

[Kantong Plastik Berbayar Membutuhkan Regulasi Nasional] [Agrivani A. Soleman]

Prodi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat,
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada

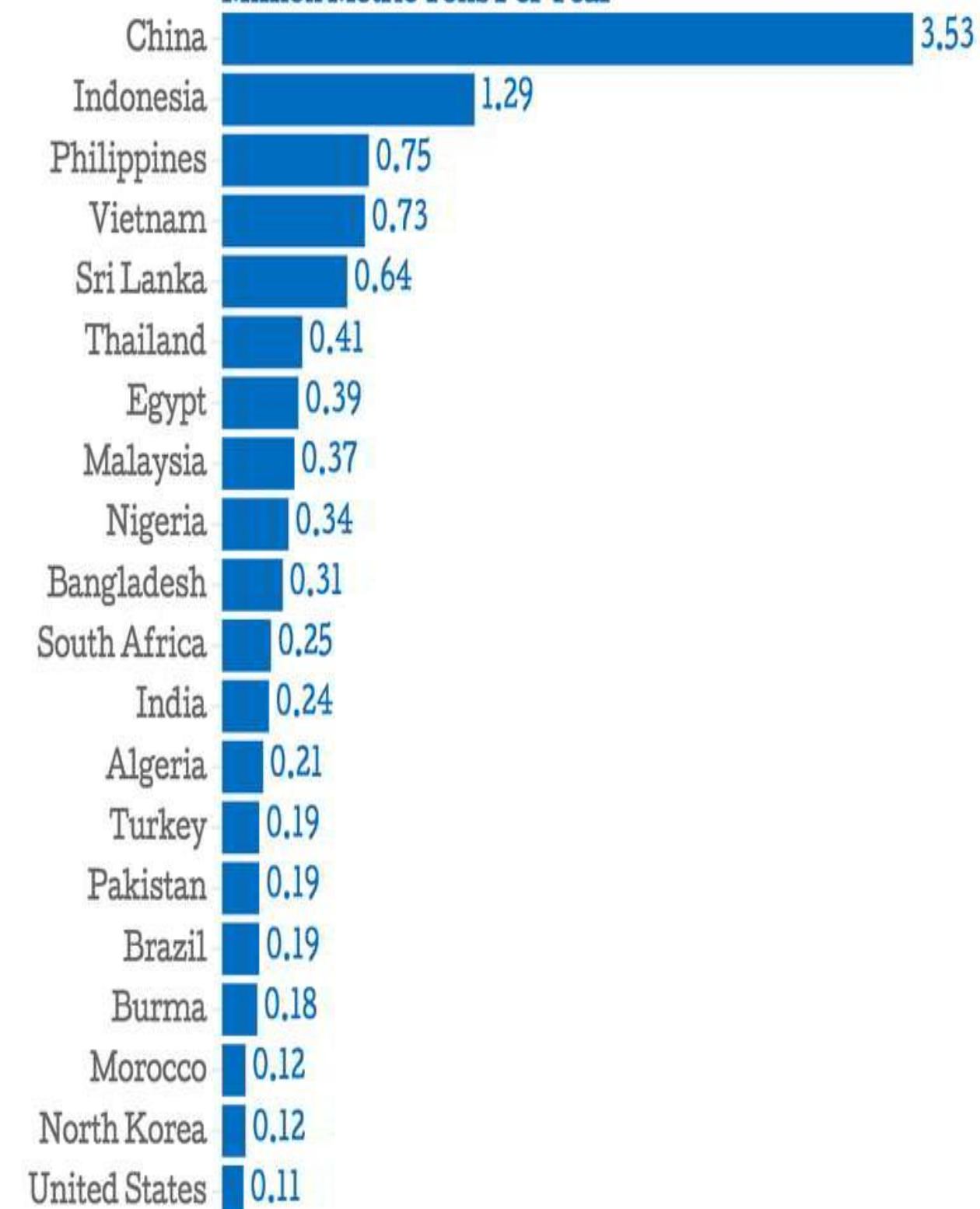


AIM / OBJECTIVE

Mengapa program ini penting:

- Indonesia saat ini adalah negara penyumbang sampah plastik terbesar ke 2 di Dunia dalam katogeri pembuangan sampah ke laut setelah China, Tiongkok.

Plastic Debris Entering World Oceans
Million Metric Tons Per Year



- Data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut.
- Kantong plastik yang terbang ke lingkungan adalah sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton. Sampah plastik yang masuk ke laut dapat terbelah menjadi partikel-partikel kecil yang disebut microplastics dengan ukuran 0,3 – 5 milimeter. Microplastics ini sangat mudah dikonsumsi oleh hewan-hewan laut.



RESULTS

Program Saat ini:

- Menuai banyak pro dan kontra diberbagai kalangan masyarakat karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
- Dasar hukum yang tidak jelas membuat pemerintah daerah menerbitkan aturannya masing-masing.
- Aturan yang ada belum dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak bergantung pada kantong plastik dengan membawa tas belanja sendiri.
- Masyarakat masih belum menyadari pentingnya aturan ini karena tidak ada regulasi nasional sebagai induk.



CONCLUSIONS

Program Kantong Plastik Berbayar Membutuhkan Regulasi Nasional:

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera membuat Regulasi Nasional untuk Kantong Plastik Berbayar agar memiliki dasar hukum yang jelas.
- Harga kantong plastik berbayar harus dinaikan dari Rp. 200 menjadi Rp. 2000 - 5000.
- Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia harus membuat aturan tentang Kantong Plastik Berbayar.
- Masyarakat diberi sosialisasi untuk membawa kantong belanja sendiri (non plastik) ketika berbelanja.
- Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan ritel, menyediakan kantong belanja gratis pada saat diterbitkannya aturan Kantong Plastik Berbayar di tiap daerah.
- Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan inspeksi rutin untuk memonitoring berjalannya aturan ini di setiap toko ritel.

BIBLIOGRAPHY

- Andreas, Damianus. 2018. "Apa Kabar Kebijakan Kantong Plastik Berbayar?" *tirto.id*: 1–3.
- Ayuningtyas, Rita. 2019. "Penerapan Kantong Plastik Berbayar Perlu Ada Peraturan Menteri." *liputan6.com*: 1–2.
- Jambeck, Jenna R et al. 2015. "Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean." *Science* 347(6223): 768–72.
- "Perpres Nomor 83 Tahun 2018.Pdf." 2018. : 1–10.
- Puspita, Sherly. 2018. "Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua Di Dunia." *kompas.com*: 1–2.
- Tarore, Alex Bryan. 2018. "Paus Mati Karena Tercemar 5 Kg Plastik , Teguran Buat Kita !" *tribunmanado.co.id*: 1–3.